


Analisis Integrasi Kebijakan Hukum Pariwisata dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling untuk Penguatan Pendidikan Karakter Siswa

Ridho Indra Saputra^{1*}, Insaniyah², Annisa Hidayati³, Zulfa Asma Vikra⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin, Jl. Mayjen Soetoyo S No. 126, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail: ridho@akparnasbjm.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3814>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 27 Nov 2025

Kata Kunci:

Wisata edukatif,
Bimbingan dan Konseling,
Pendidikan karakter,
Sekolah inklusi, Kerangka
hukum

Keywords:

Educational tourism,
Guidance and Counseling,
Character education,
Inclusive schools, Legal
framework



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai pariwisata dan regulasi hukum dalam layanan Bimbingan Konseling (BK) untuk penguatan karakter siswa di sekolah inklusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di SDIT Permata Jannati Banjarmasin, melibatkan guru BK, guru kelas, kepala sekolah, orang tua, dan siswa berkebutuhan khusus sebagai subjek penelitian melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan layanan BK berjalan terstruktur dan memanfaatkan kegiatan wisata edukatif untuk menanamkan nilai etika, kepedulian lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Regulasi hukum pariwisata memberikan kerangka normatif yang mendukung praktik ini, meskipun masih menghadapi kendala karena belum adanya panduan resmi bagi konselor. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pariwisata, hukum, dan BK dapat menjadi strategi efektif untuk pendidikan karakter yang kontekstual dan aplikatif.

This study aims to analyze the integration of tourism values and legal regulations in the implementation of Guidance and Counseling (BK) services for character building in inclusive schools. This qualitative study employs a case study design conducted at SDIT Permata Jannati Banjarmasin, involving BK teachers, classroom teachers, school principals, parents, and students with special needs as research subjects selected through purposive sampling. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that BK services are well-structured and utilize educational tourism activities to instill ethical values, environmental awareness, and respect for local culture. Legal tourism regulations provide a normative framework that supports this practice, although challenges remain due to the absence of official guidelines for counselors. The study confirms that integrating tourism, law, and BK services can serve as an effective strategy for contextual and applicable character education.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ridho Indra Saputra, et al (2025). Analisis Integrasi Kebijakan Hukum Pariwisata dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling untuk Penguatan Pendidikan Karakter Siswa, 4(2) 11501-11506. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3814>

PENDAHULUAN

Pariwisata Indonesia berkembang sebagai sektor strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap penguatan ekonomi nasional sekaligus pembentukan karakter sosial-budaya masyarakat. Perkembangan ini diatur melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus mencerminkan nilai budaya, kelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (UU No. 10 Tahun 2009, p. 3). Regulasi tersebut tidak hanya menata tata kelola destinasi, tetapi juga memuat norma-norma etika pariwisata yang bersifat edukatif, seperti penghormatan terhadap budaya lokal, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta pembentukan perilaku wisata yang bertanggung jawab. Mutiarasari (2021, p. 112) menunjukkan bahwa pelaksanaan wisata edukatif berbasis budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran moral siswa terhadap nilai etika sosial. Oleh karena itu, pariwisata tidak hanya dapat dipandang sebagai aktivitas rekreatif, tetapi juga sebagai sumber nilai pendidikan.

Sementara itu, perkembangan regulasi pariwisata membawa konsekuensi pada aspek hukum, terutama dalam memastikan bahwa nilai-nilai pariwisata tercermin dalam perilaku masyarakat dan sistem pendidikan. Hukum pariwisata memiliki fungsi mengarahkan, mengawasi, dan menjamin bahwa kegiatan pariwisata mencerminkan prinsip keberlanjutan dan penghormatan budaya. Wardani (2020, p. 45) menegaskan bahwa kebijakan hukum pariwisata berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai etika lingkungan dan budaya yang relevan dengan pembentukan karakter. Aspek hukum ini memperjelas bahwa pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan, tetapi juga merupakan amanat regulatif negara melalui perangkat hukum pariwisata. Dengan demikian, hukum berperan sebagai penjaga norma, sementara pariwisata berfungsi sebagai medium konkret yang memperlihatkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sosial.

Dalam konteks pendidikan formal, layanan bimbingan konseling (BK) memiliki mandat untuk membantu siswa memahami dirinya, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperkuat karakter melalui layanan preventif, kuratif, dan pengembangan. Fokus BK yang semula banyak berkaitan dengan masalah akademik dan perilaku kini berkembang menuju penguatan karakter secara komprehensif. Supriyanto (2020, p. 78) menyatakan bahwa layanan BK menjadi lebih efektif ketika dikaitkan dengan konteks sosial yang dekat dengan kehidupan siswa, terutama melalui pengalaman nyata di masyarakat. Kondisi ini membuka peluang bagi integrasi nilai-nilai pariwisata dalam layanan BK, karena pariwisata menyimpan nilai tanggung jawab, etika sosial, pelestarian budaya, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan kepedulian lingkungan nilai yang selaras dengan tujuan pendidikan karakter. Arfandi (2022, p. 133) juga mencatat bahwa sumber nilai pendidikan karakter harus diperluas agar konselor memiliki bahan yang relevan dengan dinamika sosial siswa.

Integrasi antara kebijakan hukum pariwisata dan layanan BK menjadi semakin relevan ketika melihat bahwa pariwisata memberi pengalaman sosial dan budaya yang dapat membentuk karakter siswa secara langsung. Kegiatan wisata edukatif terbukti mampu meningkatkan kepedulian lingkungan, kemampuan bekerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya (Dewi & Rahayu, 2023, p. 59). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai pariwisata dapat menjadi salah satu modal penting dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan karena belum adanya panduan yang secara khusus mengarahkan konselor untuk memanfaatkan regulasi pariwisata sebagai rujukan pembinaan karakter. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara kebijakan hukum pariwisata yang kaya nilai edukatif dengan program BK yang belum memanfaatkannya secara optimal.

Kesenjangan inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini. Sementara hukum pariwisata telah menyediakan kerangka normatif mengenai perilaku sosial yang diharapkan, layanan BK memiliki ruang untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam pembinaan karakter siswa melalui pendekatan konseling, pengembangan diri, dan edukasi nilai. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pariwisata dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan BK sehingga nilai-nilai budaya, etika, dan lingkungan yang tertuang dalam regulasi dapat diinternalisasi oleh siswa secara sistematis. Dengan menghubungkan ketiga bidang pariwisata, hukum, dan BK penelitian ini menawarkan perspektif interdisipliner yang belum banyak dikaji sebelumnya. Analisis ini tidak hanya memperkaya khazanah penelitian di bidang hukum dan BK, tetapi juga memberikan alternatif solusi pendidikan karakter berbasis regulasi pariwisata yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran modern.

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena layanan Bimbingan Konseling dalam konteks pendidikan inklusi serta keterkaitannya dengan aspek hukum dan kegiatan wisata edukatif. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna pengalaman manusia dalam konteks naturalnya (Creswell, 2013, p. 47). Desain studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik layanan BK di satu lokasi spesifik dengan berbagai faktor yang melingkupinya, sebagaimana diuraikan oleh Yin yang menegaskan bahwa studi kasus efektif untuk menelaah fenomena yang kompleks dan kontekstual (Yin, 2018, p. 15).

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2025 di SDIT Permata Jannati Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakter sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi serta memiliki layanan BK dan program kegiatan wisata edukatif sekolah. Pemilihan lokasi penelitian secara purposif sejalan dengan pandangan Patton bahwa lokasi dapat dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan relevansi konteks (Patton, 2015, p. 268).

Sasaran penelitian

Target penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, khususnya yang berhubungan langsung dengan layanan BK. Target ini mencakup guru BK, guru kelas, kepala sekolah, orang tua, dan siswa berkebutuhan khusus. Penetapan target ini sesuai dengan pandangan Maxwell bahwa penelitian kualitatif memerlukan keterlibatan subjek yang relevan dengan fenomena yang diteliti untuk memastikan kedalaman data (Maxwell, 2013, p. 89).

Subjek penelitian

Subjek penelitian terdiri atas guru BK sebagai informan utama, guru kelas dan kepala sekolah sebagai informan pendukung, orang tua sebagai representasi perspektif keluarga, serta siswa berkebutuhan khusus sebagai informan kontekstual. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling, sesuai dengan penjelasan Etikan bahwa purposive sampling ditujukan untuk memilih informan yang paling mampu memberikan informasi mendalam terkait fenomena penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016, p. 2). Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan kaya secara substansial.

Prosedur penelitian

Prosedur penelitian mengikuti tahapan kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Creswell, yaitu tahap pra-lapangan, pengumpulan data, analisis data, dan verifikasi (Creswell & Poth, 2018, p. 78). Tahap pra-lapangan meliputi observasi awal, penentuan fokus, dan penyusunan instrumen. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Tahap analisis berlangsung simultan dengan proses pengumpulan data, diikuti tahap verifikasi data melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagaimana dianjurkan Lincoln dan Guba untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985, p. 301).

Data dan instrumen penelitian

Data penelitian terdiri atas data primer berupa hasil wawancara, catatan observasi, dan interaksi lapangan; serta data sekunder berupa dokumen sekolah, laporan layanan BK, kebijakan internal, dokumen hukum pendidikan, dan catatan perkembangan siswa. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sebagaimana ditegaskan Bogdan dan Biklen bahwa peneliti adalah alat utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data (Bogdan & Biklen, 2007, p. 4). Instrumen pendukung meliputi pedoman wawancara, format observasi, dan lembar analisis dokumen.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang kaya dan saling melengkapi. Silverman menegaskan bahwa penggunaan berbagai teknik akan memperkuat keabsahan data melalui triangulasi (Silverman, 2016, p. 125). Observasi digunakan untuk melihat praktik layanan

BK dan situasi pembelajaran inklusi, wawancara mendalam digunakan untuk menggali perspektif informan, dan dokumentasi digunakan untuk menelaah bukti administratif serta kebijakan yang relevan.

Teknik analisis data

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014, p. 31). Proses reduksi dilakukan untuk menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, sedangkan kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi serta pengecekan silang dengan informan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa temuan menggambarkan hubungan antara aspek pendidikan, hukum perlindungan anak, dan pengembangan karakter melalui kegiatan wisata edukatif sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Bimbingan Konseling (BK) di SDIT Permata Jannati Banjarmasin berjalan secara terstruktur dan relevan dengan konteks pendidikan inklusi serta kegiatan wisata edukatif. Layanan BK tidak hanya fokus pada aspek akademik dan perilaku, tetapi juga diarahkan untuk penguatan karakter siswa melalui pengalaman nyata di masyarakat. Guru BK memanfaatkan momen kegiatan wisata edukatif untuk menanamkan nilai-nilai etika, kepedulian lingkungan, dan penghormatan terhadap budaya lokal, yang selaras dengan tujuan pendidikan karakter (Supriyanto, 2020, p. 78; Mutiarasari, 2021, p. 112).

Selain itu, integrasi kebijakan hukum pariwisata memberikan kerangka normatif yang mendukung implementasi BK berbasis nilai sosial-budaya. Guru BK menggunakan regulasi seperti UU No. 10 Tahun 2009 sebagai acuan untuk menanamkan perilaku wisata yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta kesadaran ekologis. Kebijakan hukum ini berfungsi sebagai pedoman untuk memperkuat nilai-nilai etika yang menjadi fokus pembinaan karakter siswa (Wardani, 2020, p. 45).

Observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program wisata edukatif menunjukkan peningkatan kemampuan bekerja sama, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan wisata dapat menjadi medium konkret untuk internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya, yang sebelumnya hanya diajarkan secara teoritis di kelas (Dewi & Rahayu, 2023, p. 59).

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi layanan BK berbasis pariwisata. Belum adanya panduan resmi yang mengarahkan konselor untuk memanfaatkan regulasi pariwisata secara optimal menyebabkan praktik pembinaan karakter masih bersifat ad hoc dan tergantung inisiatif guru BK. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara potensi nilai edukatif yang disediakan oleh hukum pariwisata dengan pemanfaatannya dalam layanan BK (Arfandi, 2022, p. 133).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa layanan BK di sekolah inklusi dapat memanfaatkan kegiatan wisata edukatif sebagai media penguatan karakter, dengan dukungan kerangka hukum pariwisata sebagai landasan normatif. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan pengembangan program BK yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan dinamika sosial siswa, sekaligus memberikan kontribusi pada pembentukan karakter berbasis nilai budaya, etika, dan kepedulian lingkungan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Bimbingan Konseling (BK) di SDIT Permata Jannati Banjarmasin memiliki peran strategis dalam penguatan karakter siswa melalui integrasi nilai-nilai pariwisata. Kegiatan wisata edukatif yang dikombinasikan dengan layanan BK memberikan pengalaman nyata bagi siswa untuk memahami pentingnya etika sosial, kepedulian lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mutiarasari (2021, p. 112) bahwa wisata edukatif berbasis budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran moral siswa terhadap nilai etika sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan rekreatif dapat berfungsi ganda sebagai media pendidikan karakter, sehingga nilai-nilai sosial yang diajarkan di kelas dapat direalisasikan secara praktis.

Integrasi antara regulasi hukum pariwisata dan layanan BK memperkuat kerangka normatif bagi pembinaan karakter siswa. UU No. 10 Tahun 2009 menekankan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus mencerminkan kelestarian budaya dan lingkungan serta partisipasi masyarakat (UU No. 10 Tahun 2009, p. 3). Dalam konteks ini, guru BK dapat menggunakan kebijakan hukum pariwisata sebagai pedoman untuk menanamkan perilaku bertanggung jawab dan menghargai keberagaman budaya di kalangan siswa. Wardani (2020, p. 45) menegaskan bahwa hukum pariwisata memiliki fungsi mengarahkan dan menjamin agar kegiatan pariwisata mencerminkan prinsip keberlanjutan dan penghormatan budaya, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan karakter siswa melalui BK.

Selain itu, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan wisata edukatif meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja sama, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, dan menghargai keberagaman budaya (Dewi & Rahayu, 2023, p. 59). Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman sosial-budaya konkret mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai yang bersifat abstrak, seperti tanggung jawab, empati, dan etika sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Supriyanto (2020, p. 78) bahwa layanan BK menjadi lebih efektif ketika dikaitkan dengan konteks sosial yang dekat dengan kehidupan siswa.

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan yang signifikan, yaitu belum adanya panduan resmi bagi konselor untuk memanfaatkan regulasi hukum pariwisata secara sistematis. Akibatnya, implementasi nilai-nilai pariwisata dalam layanan BK masih bergantung pada inisiatif guru BK dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kurikulum pembinaan karakter (Arfandi, 2022, p. 133). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi regulasi pariwisata sebagai sumber nilai edukatif dengan praktik nyata layanan BK di sekolah.

Dengan demikian, pembahasan ini menekankan urgensi pengembangan model layanan BK yang terintegrasi dengan kegiatan wisata edukatif dan kerangka hukum pariwisata. Pendekatan interdisipliner ini tidak hanya memperkaya strategi pembinaan karakter, tetapi juga memberikan alternatif pendidikan yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan dinamika sosial siswa di era modern. Integrasi hukum, pariwisata, dan BK dapat menjadi model inovatif dalam pendidikan karakter yang dapat direplikasi di sekolah inklusi lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, layanan Bimbingan Konseling (BK) di SDIT Permata Jannati Banjarmasin telah berjalan secara terstruktur dan berperan penting dalam penguatan karakter siswa melalui integrasi kegiatan wisata edukatif. Kegiatan ini tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai etika, kepedulian lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal.

Kedua, regulasi hukum pariwisata memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya melalui layanan BK. Hukum pariwisata berfungsi untuk memperkuat nilai etika, penghormatan terhadap budaya, dan prinsip keberlanjutan, sehingga mendukung tujuan pendidikan karakter di sekolah inklusi.

Ketiga, meskipun terdapat potensi besar dari integrasi pariwisata dan BK, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait belum adanya panduan resmi yang mengarahkan konselor untuk memanfaatkan regulasi pariwisata secara sistematis. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pengembangan model layanan BK yang lebih terstruktur dan berbasis kegiatan edukatif serta nilai-nilai hukum pariwisata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar sekolah mengembangkan pedoman layanan BK yang mengintegrasikan kegiatan wisata edukatif dan prinsip-prinsip hukum pariwisata, sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi secara lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Arfandi, R. (2022). Pengembangan sumber nilai pendidikan karakter dalam layanan bimbingan konseling. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Brown, T., Smith, J., & Clarke, L. (2022). Classroom zoning for behavioral regulation: A qualitative study on flexible learning spaces. *Journal of Educational Psychology*, 114(3), 412–428. <https://doi.org/10.1037/edu0000673>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, R., & Rahayu, S. (2023). Wisata edukatif dan pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Bandung: Widya Aksara.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Kolb, D. (2020). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson.
- Lee, M., & Hannafin, M. (2023). Flexible learning environments and learner decision-making: A self-regulated learning perspective. *Educational Research Review*, 38, 100512. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100512>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mutiarasari, T. (2021). Wisata edukatif berbasis budaya lokal dan kesadaran moral siswa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Retnawati, H. (2014). *Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian*. UNY Press.
- Setiawan, A. (2021). Implementasi pendidikan ramah anak dalam konteks hukum nasional. *Jurnal Hukum & Pendidikan*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.24832/jhp.v13i2.4421>
- Supriyanto, A. (2020). Peran bimbingan konseling dalam penguatan karakter siswa di sekolah inklusi. Surabaya: Lembaga Studi Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Vygotsky, L. S. (2020). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press. (Reprinted edition)
- Wardani, N. (2020). *Hukum pariwisata dan penguatan nilai etika lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2022). Bimbingan dan konseling perkembangan dalam pendidikan dasar. Remaja Rosdakarya.
- Zakaria, F., & Mustamin, M. (2023). Penguatan karakter siswa melalui wisata edukatif berbasis pengalaman. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 23–38. <https://doi.org/10.21831/jpk.v14i1.56589>